



PEMKOT YOGYA BANGUN KOLABORASI BERSAMA KPK

Keluarga Berintegritas Pondasi Cegah Tindakan Korupsi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya dan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) memiliki pandangan yang sama terkait keluarga berintegritas. Hal ini karena terwujudnya keluarga yang berintegritas menjadi pondasi dalam mencegah tindakan korupsi. Pemkot pun berkolaborasi bersama KPK dalam memperkuat upaya pencegahan.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan KPK untuk menegakkan bagaimana korupsi itu tidak dilakukan dan bahkan bisa menghindarkan diri dari korupsi. Makanya ini kami bangun dari lingkungan paling kecil, yakni keluarga yang berintegritas," tandas Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, di sela bimbingan teknis (bimtek) di New Saphir Hotel, Rabu (18/10).

Dalam bimtek terkait keluarga berintegritas tersebut menghadirkan para pejabat di lingkungan Pemkot Yogya sebagai peserta. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda),

kepala dinas hingga mantri pamong praja atau camat. Para pejabat itu turut didampingi oleh suami atau istrinya masing-masing. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjend Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi SIK SH MM MH bersama timnya juga hadir langsung menyampaikan materi.

Singgih menambahkan, membangun keluarga yang berintegritas sebagai bekal dalam melayani masyarakat juga selaras dan relevan dengan tema HUT Kota Yogya yakni *Tatag, Teteg dan Tutug*. *Tatag* sama halnya memiliki

pendirian yang kuat, *Teteg* berarti komitmen yang dibangun, dan *Tutug* refleksi dari tanggung jawab secara penuh. "Nilai integritas itu teraplikasikan dalam pendirian, komitmen dan tanggung jawab. Ini yang akan terus kami ingatkan melalui keluarga masing-masing. Setelah bimtek ini akan kami tindaklanjuti melalui forum-forum di internal tiap OPD," imbuhnya.

Di samping itu, Pemkot juga telah memiliki sejumlah regulasi guna menegakkan terjadinya korupsi. Kiprah Inspektorat sebagai pemberi peringatan dini bagi internal pejabat di Kota Yogya juga se-

makin kuat. Bahkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai kanal yang terbuka secara luas.

Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjend Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, SIK SH MM MH, menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya melalui penegakan atau penindakan, melainkan harus diimbangi dengan pendidikan dan pencegahan. Ketiga hal itu harus bisa bersinergi serta didukung oleh peran serta masyarakat.

"Dengan pendidikan kita informasikan ke masyarakat agar tidak korupsi. Pencegahan salah satunya dengan perubahan sistem untuk menutup celah korupsi. Sedangkan penindakan supaya menim-



Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menyampaikan materi bimtek kepada pejabat Pemkot Yogya yang didampingi keluarganya.

bulkan efek jera," tandasnya.

Sepanjang KPK dibentuk hingga September 2023, total terdapat 1.648 tersangka korupsi yang ditangani. Dari jumlah itu, sebanyak 141 tersangka ialah kaum perempuan yang ikut terseret dalam pusaran korupsi. Selain itu banyak pula kasus korupsi yang melibatkan istri

dan anak atau keluarganya. Bahkan ada pula pejabat yang tidak mempan disuap namun justru dititipkan melalui istri atau anaknya.

Oleh karena itu mewujudkan keluarga yang berintegritas menjadi kunci dalam mencegah tindakan korupsi. Kejujuran, keterbukaan dan kepercayaan harus mampu

terbangun di setiap keluarga.

"Mengapa suami atau istri pejabat kita hadirkan, supaya bisa saling mendukung. Kuncinya adalah keluarga. Kita ingatkan tujuan keluarga dibangun itu apa. Sehingga menjadi ASN itu harus hidup dengan sederhana, hindari gaya hidup yang hedon," jelas Kumbul. **(Dhif-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005